



DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BUKU SAKU

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi adalah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Saat ini tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan sebanyak mungkin satuan kerja berpredikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam rangka mendukung pencapaian reformasi birokrasi Direktorat PAUD berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan ZI-WBK. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Salah satu upaya menyiapkan bahan yang dapat digunakan untuk mempercepat sosialisasi dan internalisasi pembangunan tersebut adalah dengan membuat Buku Saku Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Semoga dengan adanya Buku Saku Pedoman ZI-WBK/WBBM dapat bermanfaat sebagaimana yang kita harapkan.

Jakarta, Mei 2023

Pt. Direktur PAUD,



Komalasari, M.Pd.

NIP 197812252002122003



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PROFIL ZI WBK DIREKTORAT PAUD.....	1
HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	2
DASAR HUKUM.....	2
DEFINISI.....	3
TAHAPAN PEMBANGUNAN MENUJI ZI WBK/WBBM.....	4
KOMPONEN PEMBANGUNAN.....	4
SYARAT PENGAJUAN WBK DAN WBBM.....	5
SYARAT MINIMAL UNIT KERJA MEMENUHI KATEGORI WBK DAN WBBM.....	6
KOMPONEN PENGUNGKIT.....	7
6 AREA PERUBAHAN.....	7
1. Manajemen Perubahan.....	7
2. Penataan Tatalaksana.....	9
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	10
4. Penguatan Akuntabilitas.....	12
5. Penguatan Pengawasan.....	13
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	15
KOMPONEN HASIL.....	16
9 INOVASI DIREKTORAT PAUD.....	18
1. Aplikasi PAUDPEDIA (Dalam Bentuk <i>Mobile</i>).....	18
2. Layanan Esensial PAUD HI.....	19
3. Implementasi Bunda PAUD.....	20
4. Internalisasi Kebijakan Merdeka Belajar.....	22
5. Webinar Orangtua Berbagi.....	22
6. 200 Dongeng untuk Anak Indonesia.....	23



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

7. Galeri Ceria	24
8. <i>Dashboard</i> Verval Akreditasi PAUD	24
9. E-Proposal	25
10. Panduan Perilaku CORE VALUE ASN BerAKHLAK	26





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

PROFIL ZI WBK DIREKTORAT PAUD

Visi

Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Misi

- Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
- Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Motto

“Satu Tim Satu Tujuan PAUD Berkualitas.”

Tugas dan Fungsi Direktorat PAUD

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat PAUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini.

1. Perumusan kebijakan;
2. Perumusan standar;
3. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu;
4. Penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
5. Fasilitasi penyelenggaraan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
7. Pemantauan, evaluasi dan, pelaporan;
8. Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan
9. Pelaksanaan urusan ketata usahaan Direktorat.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan Pemerintah Pusat.

Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan membangun percontohan- percontohan pada tingkat Pemerintah Pusat.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan
6. Permenpan RB No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpan RB.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

DEFINISI

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

TAHAPAN PEMBANGUNAN MENUJU ZI WBK/WBBM

Pembangunan berarti ; membangun sistem (POS dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lain, membangun manusia, membangun mindset seluruh ASN untuk malu dan merasa bersalah jika melakukan tindakan korupsi, membangun budayare formasi birokrasi dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi budaya.

1

Pencanangan ZI

- Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai; dan
- Pernyataan komitmen telah siap membangun zona.

2

Pembangunan ZI

- Penetapan calon unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM.

3

Pengusulan

- Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI);
- penilaian dilakukan oleh asesor unit utama; dan
- Penyampaian rekomendasi TPI kepada pimpinan instansi.

4

Review Tim Penilai Nasional

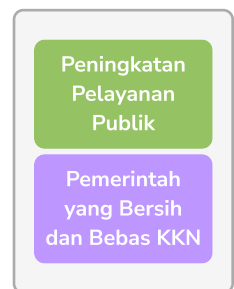
- MENPAN dan RB mengusulkan kepada instansi pemerintah agar unit kerja ditetapkan sebagai WBK; dan
- MENPAN dan RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM.

KOMPONEN PEMBANGUNAN

PENGUNGKIT (60%)



HASIL (40%)





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

SYARAT PENGAJUAN WBK DAN WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Nilai SAKIP minimal "B"	Nilai SAKIP minimal "BB"
	Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga	Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3t	
Tingkat Unit Kerja/ Satuan Kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%	
	LHKASN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

SYARAT MINIMAL UNIT KERJA MEMENUHI KATEGORI WBK DAN WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,5	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,0 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

SYARAT

Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal

WBK

16
(survey 3,20)

WBBM

18
(survey 3,60)

KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

6 AREA PERUBAHAN

1

MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

Penyusunan Tim Kerja

- Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;
- Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- Terdapat mekanisme atau media untuk menyosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
- Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Agen Perubahan telah ditetapkan;
- Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
- Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

2

PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana **bertujuan** untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

- Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
- Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
- Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

SPBE

- Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
- Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.

Keterbukaan Informasi Publik

- Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur **bertujuan** untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

- Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
- Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
- Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pola Mutasi Internal

- Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
- Unit kerja telah memiliki *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*); dan
- Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

Penetapan Kinerja Individu

- Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
- Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

Penegakan aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Sistem Informasi Kepegawaian

- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

4

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Keterlibatan Pimpinan

- Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan
- Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- Indikator kinerja telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound* (SMART);
- Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
- Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja.
- Unit Kerja telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

5

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

Pengendalian Gratifikasi

- Unit kerja telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
- Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

- Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
- Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pengaduan Masyarakat

- unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Whistle Blowing System

- unit kerja telah menerapkan *whistle blowing system*;
- unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan
- unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.

Penanganan Benturan Kepentingan

- Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
- Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

- Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;
- Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

6

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

Standar Pelayanan

- Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- Unit kerja telah memaklumkan standar pelayanan;
- Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
- Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Budaya Pelayanan Prima

- Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, etika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- Unit kerja telah memiliki sistem *reward* and *punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.

Budaya Pelayanan Prima

- Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

KOMPONEN HASIL

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN.	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	20%

Hasil Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Tidak adanya diskriminasi pelayanan;
 - b. Tidak ada kecurangan pelayanan;



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

- c. Tidak menerima imbalan dan gratifikasi;
- d. Tidak ada percaloan; dan
- e. Tidak ada pungutan liar.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

1

Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;

2

Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;

3

Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

4

Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;

5

Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;

6

Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit; dan

7

Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

9 INOVASI DIREKTORAT PAUD

- 1 Aplikasi PAUDPEDIA
- 2 Layanan Esensial PAUD HI
- 3 Implementasi Bunda PAUD
- 4 Internalisasi Kebijakan Merdeka Belajar
- 5 Webinar Orangtua Berbagi
- 6 200 Dongeng untuk Anak Indonesia
- 7 Galeria Ceria
- 8 Dashboard Verval Akreditasi PAUD
- 9 E-Proposal

1

APLIKASI PAUDPEDIA (DALAM BENTUK MOBILE)

Aplikasi PAUDPEDIA berbasis Android & iOS adalah inovasi Direktorat PAUD yang bertujuan **mempermudah** akses media pembelajaran, forum komunikasi, dan produk Direktorat PAUD.

Dampak Aplikasi PAUDPEDIA



Efisiensi dalam memperoleh informasi kebijakan, program, kegiatan, dan sarana pembelajaran;



Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi kebijakan, program, kegiatan, dan sarana pembelajaran; dan



Kemudahan berbagi pengalaman praktik baik dan inovasi.



Pembiasaan dalam penggunaan teknologi untuk mendorong transformasi digital.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)



Pembiasaan dalam penggunaan teknologi untuk mendorong transformasi digital.

2

LAYANAN ESENSIAL PAUD HI

Delapan Indikator Layanan Holistik Integratif adalah alat ukur/ pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di satuan PAUD.

Latar Belakang Permasalahan

- 01 Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas;
- 02 Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- 03 Tingginya prevalensi stunting karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gizi baik; dan
- 04 Masih rendahnya pemahaman satuan pendidikan dan masyarakat terkait PAUD HI. (Miskonsepsi terhadap PAUD HI).

Dampak dan Manfaat Layanan Esensial PAUD HI

- 01 Meningkatnya kesadaran dari satuan pendidikan untuk dapat memenuhi 8 indikator layanan Holistik Integratif dan melakukan pemutakhiran data di DAPODIK;



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

02 Menguatnya komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif; dan

03 Menurunnya angka prevalensi stunting dari tahun 2019 ke 2021 sebesar 3,3% dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 2,8% (Sumber data dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022).

3

IMPLEMENTASI BUNDA PAUD

Bunda PAUD adalah sebutan kepada istri kepala pemerintahan/daerah atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/daerah perempuan sebagai **penggerak utama** dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini.

Latar Belakang Permasalahan

01 Rendahnya pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya pendidikan anak usia dini;

02 Rendahnya dukungan anggaran dan sumber daya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

03 Masih rendahnya APK (Angka Partisipasi Kasar) anak usia dini yang masuk ke jenjang PAUD;

04 Masih banyak desa/kelurahan belum memiliki satuan PAUD; dan

05 Sebaran satuan PAUD belum merata.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

AKTIVITAS KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	INSTANSI YANG TERLIBAT
Melakukan Rakornas Bunda PAUD	Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD	Kemendagri
Menerbitkan Pedoman Peran Bunda PAUD	Dinas Pendidikan	Kemendesa PDTT
Apresiasi Bunda PAUD	Satuan Pendidikan	Bunda PAUD Dinas Pendidikan Kemendesa PDTT
Bimtek dan Monev Pokja Bunda PAUD	Orang Tua	Organisasi Mitra PAUD & Mitra Pembangunan (Oase-KIM, HIMPAUDI, IGTKI, Aisiyah, Muslimat NU, kartika Jaya, PKK, Dharma wanita, dll).
Memberikan Bantuan Pokja Bunda PAUD	Anak Usia Dini	Kemdikbudristek

Dampak Implementasi Bunda PAUD

- 01** Meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD;
- 02** Meningkatnya jumlah satuan PAUD;
- 03** Meningkatnya jumlah desa memiliki layanan PAUD;
- 04** Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan PAUD berkualitas; dan
- 05** Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

4

INTERNALISASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Internalisasi Kebijakan Merdeka Belajar adalah kegiatan internal untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan merdeka belajar.

WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI YANG TERLIBAT	MANFAAT
Rutin setiap bulan	Internal direktorat PAUD	Peningkatan pemahaman tentang kebijakan merdeka belajar

5

WEBINAR ORANGTUA BERBAGI

Webinar Orang Tua Berbagi adalah serial webinar dalam bentuk daring dan berbagi informasi melalui web PAUDPEDIA terhadap masalah-masalah kekinian anak usia dini yang ada di masyarakat.

Latar Belakang Permasalahan

Memberikan edukasi dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anggota, memperoleh dan berbagi informasi, memfasilitasi anggota komunitas untuk terus belajar dan melakukan pembelajaran dengan nyaman, serta mendorong peningkatan kompetensi para anggota dengan melakukan diskusi dan sharing.

INSTANSI YANG TERLIBAT

Orang Tua	Guru	Peserta Didik
-----------	------	---------------



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Dampak Implementasi Bunda PAUD

Menjadi tempat **pengembangan diri** anggota dari segi hubungan dengan orang lain, pemerolehan pengetahuan baru, pengembangan *skill*, kepercayaan diri, dan *networking* yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan kembang anak dan dapat **menurunnya angka *stunting*** atau gagal tumbuh kembang anak.

WAKTU PELAKSANAAN

2021  2023
sampai dengan

6

200 DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA

200 Dongeng Untuk Anak Indonesia merupakan pembentukan layanan pojok baca dan pemberian penguatan keterampilan kepada orang tua dalam memanfaatkan buku bacaan anak, serta penguatan literasi anak usia dini dalam membangun kemampuan bahasa dan karakter.

WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI YANG TERLIBAT	DAMPAK
2022 s.d. Sekarang	Direktorat PAUD Lembaga Pendidikan Lembaga Masyarakat	Bahan ajar yang berkualitas, <i>user friendly</i> dengan buku untuk berbagai kondisi sehingga mendorong minat membaca dan berimplikasi pada terbentuknya penalaran kritis terhadap pembelajaran, serta terbentuknya karakter anak yang sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

7

GALERI CERIA

Galeri Ceria adalah sebuah kanal yang berisikan produk Direktorat PAUD yang terdiri dari Ruang Cerita, Ruang Bernyanyi, Ruang Bermain, Ruang Baca, dan Ruang Artikel.

Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan *stakeholder* akan bahan ajar, buku, video, artikel yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini

DAMPAK

Bahan ajar yang berkualitas, *user friendly* dengan buku untuk berbagai kondisi sehingga mendorong minat membaca dan berimplikasi pada terbentuknya penalaran kritis terhadap pembelajaran, serta terbentuknya karakter anak yang sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila.

8

DASHBOARD VERVAL AKREDITASI PAUD

Dashboard verval sampling acak akreditasi dibuat untuk memudahkan Direktorat PAUD, PSKP, UPT, dan BAN PAUD PNF dalam memantau keterisian dan kesesuaian satuan sampling acak (*compulsory*) pada proses verifikasi dan validasi sampling acak akreditasi PAUD 2023.

INSTANSI YANG TERLIBAT

Internal Direktorat PAUD

PSKP

UPT

BAN PAUD PNF

DAMPAK

SEBELUM:

1. Akreditasi belum sepenuhnya dimaknai sebagai bentuk proteksi pemda untuk memastikan warga mendapatkan layanan yang baik.
2. Akreditasi hanya dilakukan oleh satuan PAUD yang merasa sudah siap untuk diakreditasi saja (*voluntary*)

SESUDAH:

1. Sudah ada survey untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan.
2. Akreditasi dimaknai sebagai bentuk proteksi pemda kepada warga usia 5-6 tahun, dengan memastikan kualitas layanan PAUD terjaga.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

9

E-PROPOSAL

E-Proposal PAUD merupakan sarana untuk memudahkan lembaga PAUD dalam mengajukan proposal bantuan yang telah disediakan pemerintah untuk lembaga PAUD, serta pengelolaan dan pelaporan/pertanggungjawaban bantuan secara elektronik. **E-Proposal PAUD direplikasi oleh unit kerja lain, yaitu Direktorat SD.**

Manfaat E-Proposal PAUD

Satuan Pendidikan

1. Lebih cepat dan mudah dalam pengajuan, dan dapat memantau progress pengajuan secara *realtime*; dan
2. Mendorong satuan Pendidikan untuk selalu *update* data di DAPODIK.

Direktorat PAUD

Memudahkan dalam proses penilaian, proses penetapan, dan proses penyaluran.

Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal

Mempermudah aktivitas pengawasan dan pemantauan bantuan pemerintah.





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Panduan Perilaku CORE VALUE ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

01

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

02

- Berintegritas;
- Jujur;
- Bertanggungjawab;
- Cermat-efektif dan efisien; dan
- Disiplin.

Kompeten

03

- Pembelajaran;
- Profesional;
- Sharing knowledge;
- Memberikan kinerja terbaik; dan
- Menjaga kualitas.

Harmonis

04

- Bersikap positif;
- Bertoleransi;
- Merangkul keberagaman;
- Pedulisaling menghargai; dan
- Saling menolong.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Loyal

05

- Berdedikasi;
- Memegang teguh ideologi pancasila, UUD 1945, NKRI serta pemerintah yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan Negara; dan
- Menjaga rahasia jabatan- menaati aturan/kebijakan.

Adaptif

06

- Berinisiatif;
- Kreatif dan inovatif;
- Siap menghadapi ketidakpastian;
- Antusias; dan
- Siap menghadapi perubahan.

Kolaboratif

07

- Adil;
- Bekerjasama;
- Berkolaborasi Lintas Pokja;
- Memberdayakan SDM;
- Terbuka dalam komunikasi; dan
- Mengelola sumber daya.



**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kritik dan Saran disampaikan ke alamat:

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
u/p Subbag Tata Usaha

DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Komplek Kemdikbudristek Senayan - Gedung E
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. 10270

Telepon (021) 57900471

Laman: paudpedia.kemdikbud.go.id

